

Vol. 1 – Edisi 9

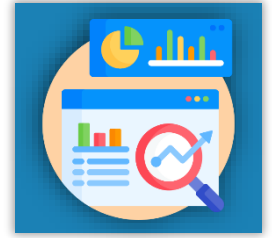
PDRD LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



September
2026

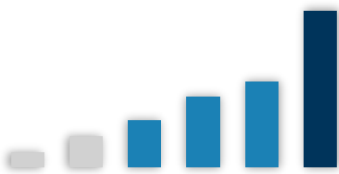
EXECUTIVE SUMMARY



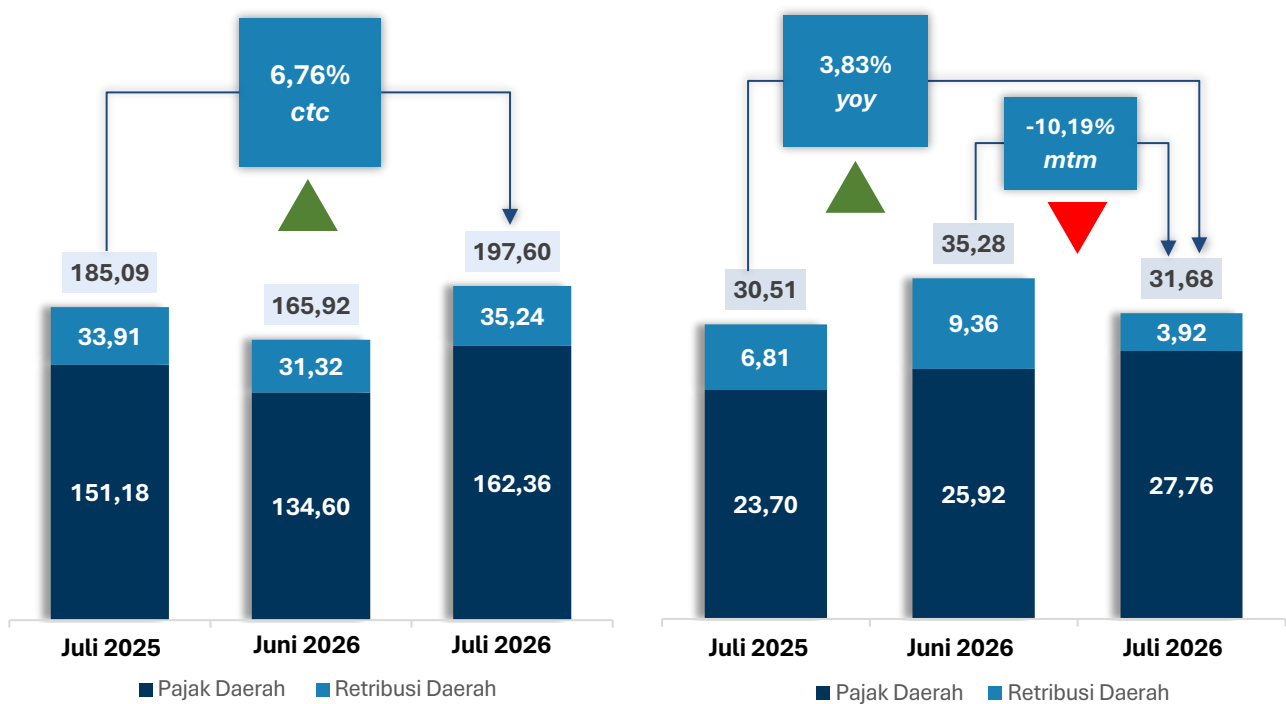
Dalam edisi kali ini, disajikan analisis atas kinerja PDRD hingga bulan Juli antara lain:

- Penerimaan PDRD pada Juli 2026 tumbuh 3,83% secara *yoy* (*year on year*), kendati terjadi kontraksi sebesar 10,19% secara *mtm* (*month to month*). Secara kumulatif, penerimaan PDRD hingga Juli 2026 mencapai Rp197,60 triliun atau meningkat 6,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
- Memasuki awal triwulan ketiga tahun 2026, penguatan penerimaan pajak daerah menunjukkan moderasi ke arah perlambatan. Berbeda dengan pajak daerah, pola penerimaan Retribusi Daerah menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi.
- Hingga Juli 2026, terdapat 14 jenis pajak daerah yang mencatatkan kinerja positif. Sementara itu, penerimaan tiga jenis pajak daerah lainnya terkontraksi. Secara kumulatif, pertumbuhan pajak daerah mampu melampaui akumulasi pertumbuhan negatif dari beberapa jenis pajak daerah sehingga penerimaan pajak hingga bulan Juli tumbuh positif.
- Secara spasial, kinerja positif penerimaan PDRD pada Juli 2026 secara nasional tidak serta merta diikuti pertumbuhan penerimaan di seluruh wilayah. Hanya wilayah Jawa Bali dan Kalimantan yang mengalami pertumbuhan secara *yoy* dan mampu mendorong kenaikan penerimaan secara nasional.
- Aktivitas produksi sektor manufaktur (*Purchasing Managers' Index*/PMI Manufaktur) pada awal triwulan tiga kembali memasuki jalur ekspansi setelah bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Sejalan dengan hal itu, penguatan juga terjadi pada daya beli masyarakat melalui indikator *Retail Sales Index* (RSI) pada Juli ini.
- Sektor otomotif tetap melanjutkan kinerja positif pada periode Juli ini dengan adanya akselerasi penjualan kendaraan bermotor. Kinerja ini berdampak pada peningkatan basis PKB dan selaras dengan peningkatan BBNKB dan Opsen BBNKB.
- Tingkat kepatuhan pembayaran PKB hingga Juli 2026 masih mengalami penurunan. Adanya kebijakan insentif PKB pada tahun lalu berupa pembebasan tunggakan pokok PKB di beberapa wilayah disinyalir menjadi faktor yang menyebabkan pendaftaran kembali kendaraan pada tahun lalu lebih tinggi dibandingkan tahun ini.
- Kinerja sektor pariwisata pada Juli ini melanjutkan tren peningkatan secara persisten sejak akhir triwulan satu. Hal tersebut terlihat dari kenaikan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan tingkat penghunian kamar hotel selaras dengan tumbuhnya penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan.
- Konsumsi energi memberikan sinyal positif pada penerimaan PDRD. Penjualan listrik yang merupakan salah satu basis utama pajak daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sejalan dengan penjualan listrik, penjualan BBKB untuk JBT dan JBKP pada Juli juga menunjukkan kinerja positif.
- Sektor properti tetap melanjutkan sinyal positif meskipun terjadi perlambatan kredit properti. Namun demikian, peningkatan penerimaan BPHTB belum sejalan dengan peningkatan basis pajaknya.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Realisasi PDRD Juli 2025-2026 (triliun rupiah)

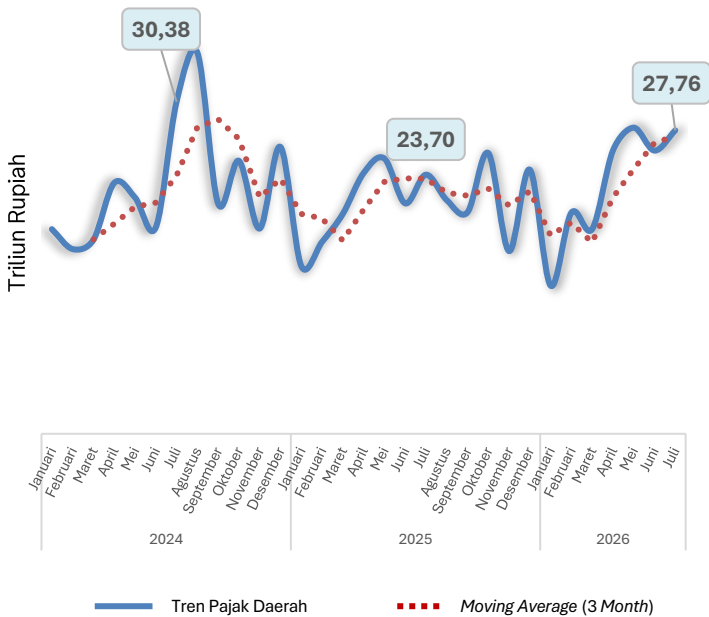


Sumber: SIKD, data per 20 September 2026

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Juli 2026 tumbuh positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kendati terjadi pelemahan jika dibandingkan dengan penerimaan bulan sebelumnya. Secara yoy, tumbuhnya penerimaan PDRD ditopang oleh realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai Rp27,76 triliun atau tumbuh 17,11%. Kinerja penerimaan pajak daerah pada Juli juga terlihat persisten jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara *mtm*, pertumbuhan tersebut mencapai 7,12%. Pertumbuhan tersebut mengompensasi kontraksi atas realisasi penerimaan retribusi daerah yang mencapai 42,42% yoy, meskipun belum mampu mendongkrak pertumbuhan secara *mtm*. Tercatat, penerimaan retribusi daerah melemah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan kontraksi sebesar 58,12%. Kinerja PDRD pada Juli 2026 ini juga mampu mendorong PDRD secara kumulatif, dengan realisasi sebesar Rp197,60 triliun atau tumbuh sebesar 6,76% dibanding periode yang sama tahun 2025 (*ctc*).



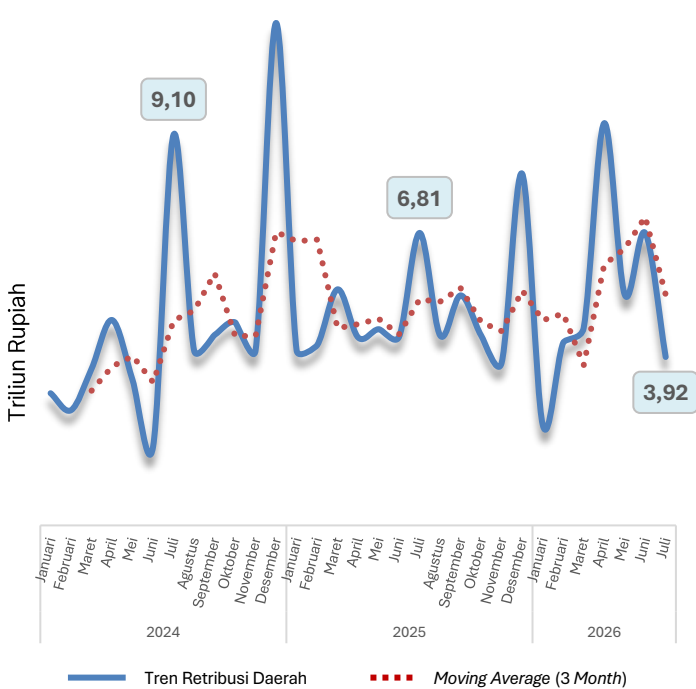
Pola Realisasi Pajak Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 20 September 2026

Memasuki awal triwulan ketiga tahun 2026, penguatan penerimaan pajak daerah menunjukkan moderasi ke arah perlambatan. Hal ini terlihat dari *moving average* yang mulai melandai pada titik yang sama. Meskipun penerimaan Juli meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Pola bulanan juga memperlihatkan bahwa penerimaan bulan Juli merupakan salah satu periode intensitas penerimaan yang tinggi. Perlu diwaspadai pelemahan selepas bulan Juli, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk memperkuat tren peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pola Realisasi Retribusi Daerah Bulanan



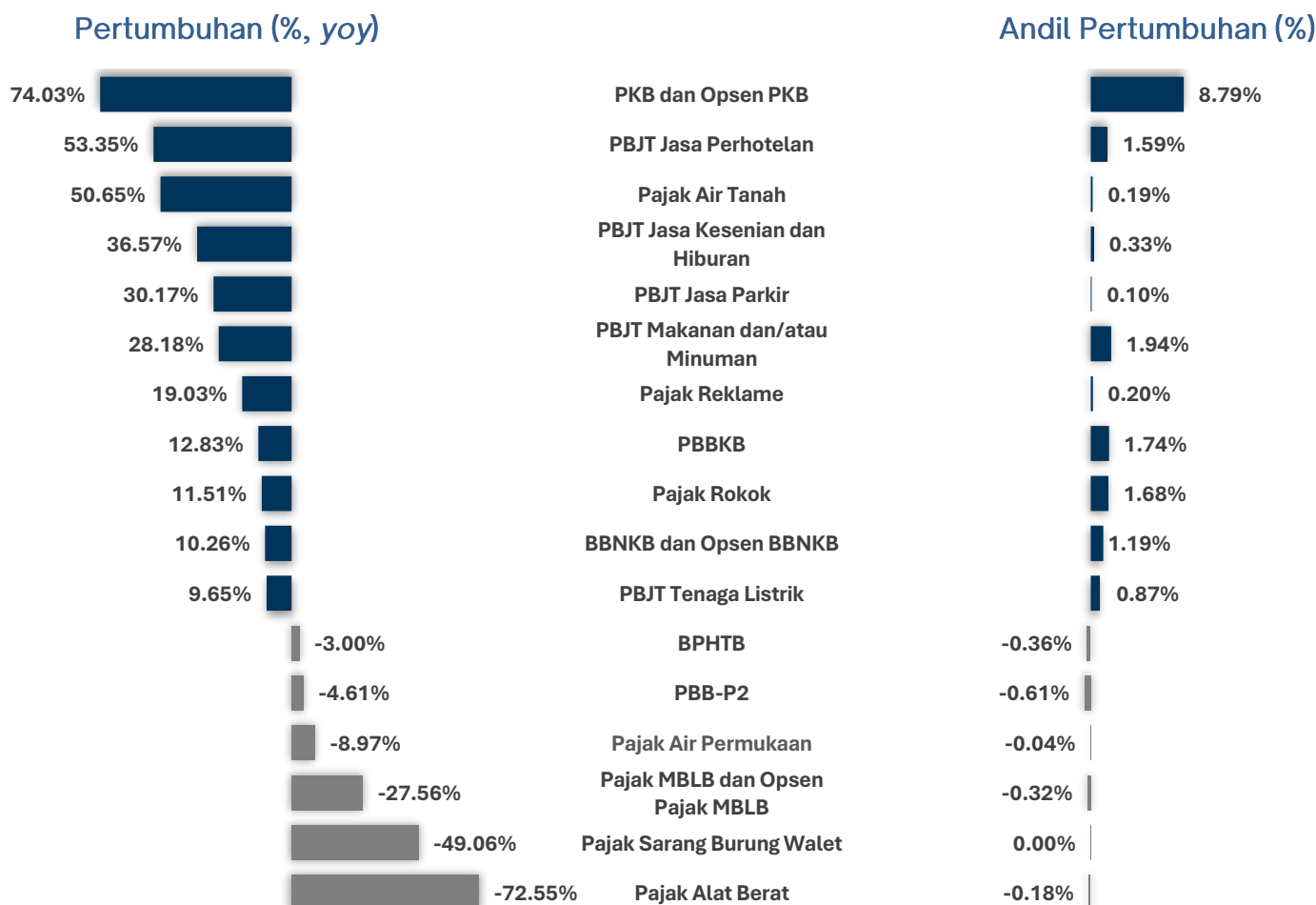
Sumber: SIKD, data per 20 September 2026

Berbeda dengan pajak daerah, pola penerimaan Retribusi Daerah menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Pada bulan Juli terjadi pelemahan momentum penerimaan. Terlihat dari penerimaan bulan Juli yang pada tahun sebelumnya berada dalam intensitas tinggi, pada tahun ini penerimaan bulan Juli justru berada dalam intensitas yang relatif rendah jika dibandingkan penerimaan bulan lain. Tidak seperti pajak daerah, durasi dari momentum penguatan maupun pelemahan retribusi daerah berlangsung cukup pendek. Artinya, banyak terjadi fluktuasi jangka pendek dalam pola penerimaan ini.



Tumbuhnya penerimaan pajak daerah tidak serta merta diikuti oleh kenaikan seluruh jenis pajaknya. Meningkatnya penerimaan pajak daerah bulan Juli ditopang oleh kenaikan sebelas jenis pajak daerah. Sementara itu, enam jenis pajak daerah lainnya mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. PKB beserta Opsen PKB dan PBJT atas Jasa Perhotelan mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara yoy dibandingkan jenis pajak lainnya. Namun demikian, jika dilihat atas andil terhadap pertumbuhan, sumber pertumbuhan tertinggi didominasi oleh PKB dan Opsen PKB, PBJT atas Makanan dan Minuman, dan PBBKB. Sementara itu, atas kontraksi pertumbuhan, PAB dan Pajak Sarang Burung Walet mencatatkan persentase penurunan terdalam dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun dilihat dari andil negatif terhadap pertumbuhan, pajak terkait properti memberikan kontribusi tertinggi yaitu PBB-P2 dan BPHTB.

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Pajak Daerah Juli 2026



Sumber: SIKD, data per 20 September 2026

REVENUE DETAIL



Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Hingga Juli 2026 (ctc)

dalam Miliar Rupiah

Jenis Pajak ¹⁾	2025	2026	Growth (%)	Andil Pertumbuhan (%)
PAP	0.70	0.89	27.21% ▲	0.13% ▲
PAT	0.60	0.73	22.10% ▲	0.09% ▲
PBJT Makanan dan/atau Minuman	10.56	12.27	16.18% ▲	1.13% ▲
PBJT Jasa Parkir	0.51	0.59	15.07% ▲	0.05% ▲
PBJT Tenaga Listrik	11.87	13.64	14.94% ▲	1.17% ▲
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	1.47	1.69	14.76% ▲	0.14% ▲
PBBKB	21.16	24.06	13.70% ▲	1.92% ▲
Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB	1.34	1.50	12.05% ▲	0.11% ▲
BBNKB dan Opsen BBNKB	17.90	20.03	11.92% ▲	1.41% ▲
PBJT Jasa Perhotelan	5.82	6.51	11.85% ▲	0.46% ▲
Pajak Reklame	1.60	1.72	7.51% ▲	0.08% ▲
PBB-P2	20.20	21.58	6.85% ▲	0.92% ▲
BPHTB	14.21	15.03	5.79% ▲	0.54% ▲
Pajak Rokok	10.46	10.87	3.96% ▲	0.27% ▲
PKB dan Opsen PKB	32.52	31.17	-4.13% ▼	-0.89% ▼
PSBW	0.00	0.00	-22.37% ▼	-0.001% ▼
PAB	0.27	0.08	-72.18% ▼	-0.13% ▼

Sumber: SIKD, data per 20 September 2026

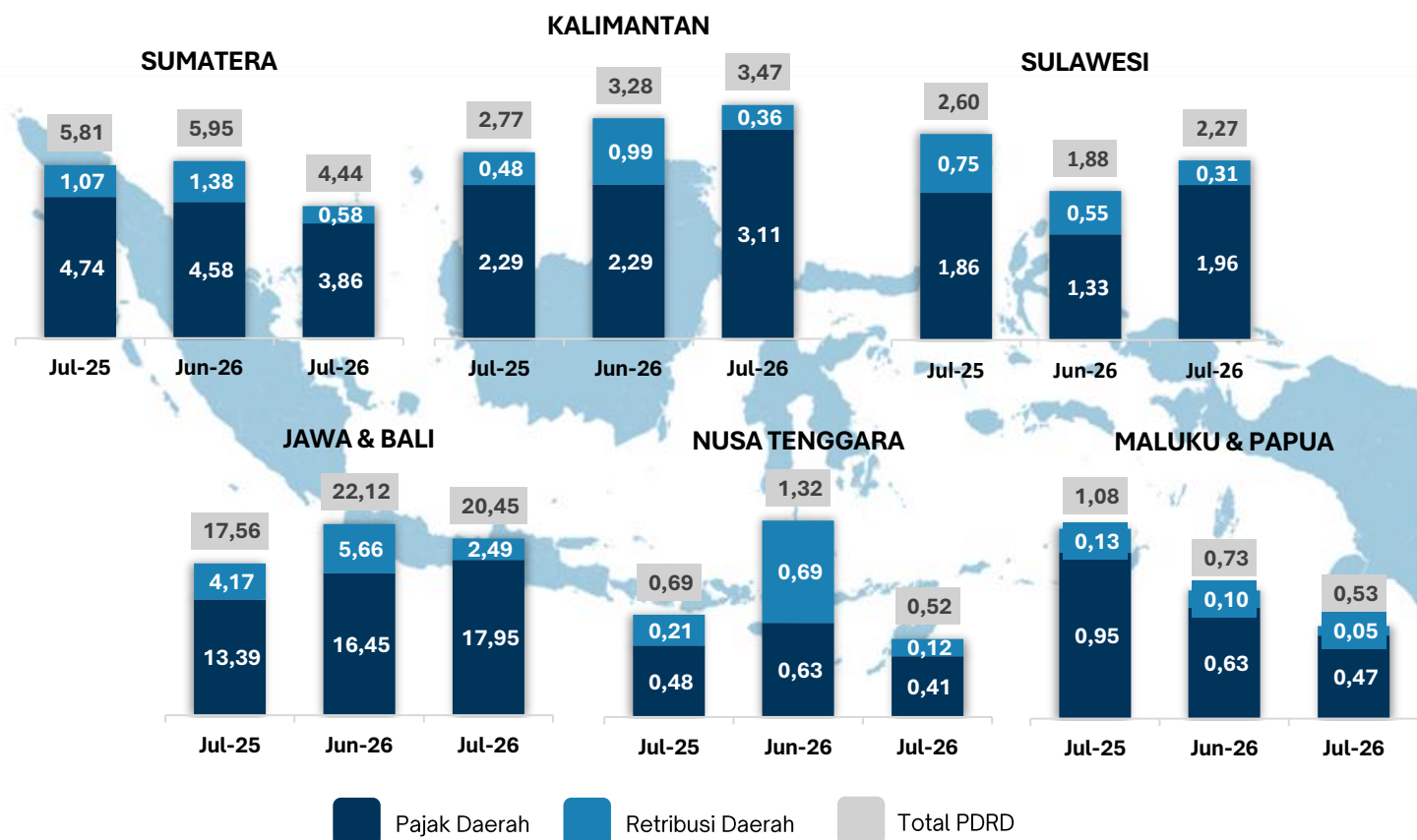
Hingga Juli 2026, terdapat 14 jenis pajak daerah yang mencatatkan kinerja positif. Sementara itu, penerimaan tiga jenis pajak daerah lainnya berkontraksi. Secara kumulatif, pertumbuhan pajak daerah mampu melampaui akumulasi pertumbuhan negatif dari beberapa jenis pajak daerah sehingga penerimaan pajak hingga bulan Juli tumbuh positif. PBBKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, dan PBJT Makanan Minuman memiliki andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan pajak daerah. Meskipun secara ctc pertumbuhannya bukan yang tertinggi, namun masing-masing jenis pajak tersebut memiliki andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan. Kontribusinya berturut-turut adalah 1,92%, 1,41% dan 1,13%.

¹⁾ PBJT: Pajak Barang Jasa Tertentu, PBB P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, MBLB: Mineral Bukan Logam dan Batuan, PKB: Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PAB: Pajak Alat Berat

SPATIAL ANALYSIS



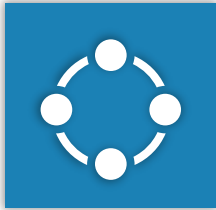
Realisasi PDRD Juli Secara Spasial (yoy dan *mtm*)



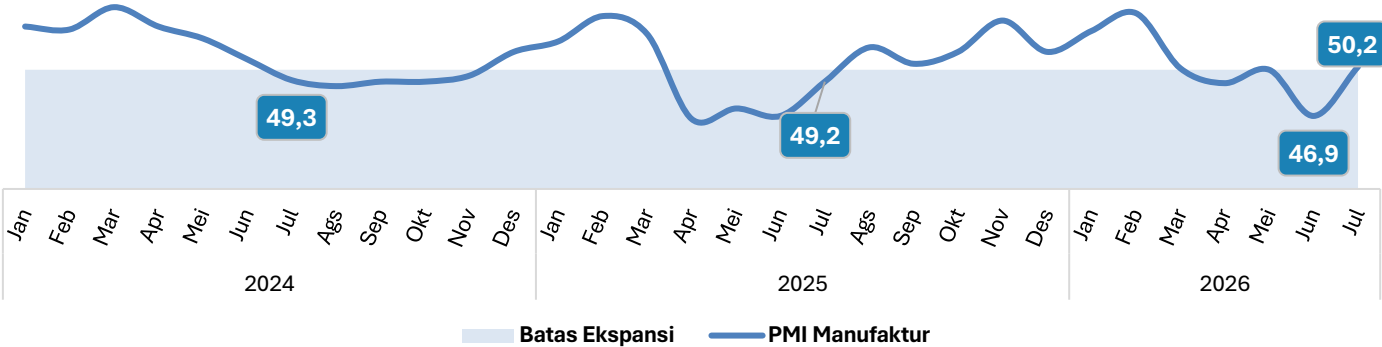
Sumber: SIKD, data per 20 September 2026

Kinerja positif penerimaan PDRD pada Juli 2026 secara nasional tidak serta merta diikuti pertumbuhan penerimaan di seluruh wilayah. Hanya wilayah Jawa Bali dan Kalimantan yang mengalami pertumbuhan secara yoy dan mampu mendorong kenaikan penerimaan secara nasional. Penerimaan PDRD wilayah Jawa Bali tumbuh 16,45% yoy sedangkan wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 25,4%. Sementara itu wilayah lain mengalami kontraksi. Adapun wilayah-wilayah yang mengalami kontraksi umumnya mengalami kontraksi ganda yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Hanya wilayah Sulawesi yang kontraksinya dipicu oleh penerimaan retribusi daerah. Maluku Papua dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi yang paling dalam. Masing-masing mengalami penurunan penerimaan PDRD berturut-turut sebesar 51,16% dan 23,83% secara yoy. Selain itu, pola spasial juga menunjukkan adanya pelemahan atau perlambatan penerimaan PDRD. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi penerimaan bulan Juli yang lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya di seluruh wilayah, kecuali hanya Kalimantan dan Sulawesi.

RELATED INDICATORS



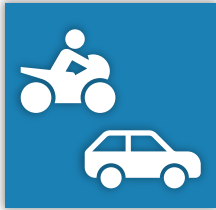
Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur



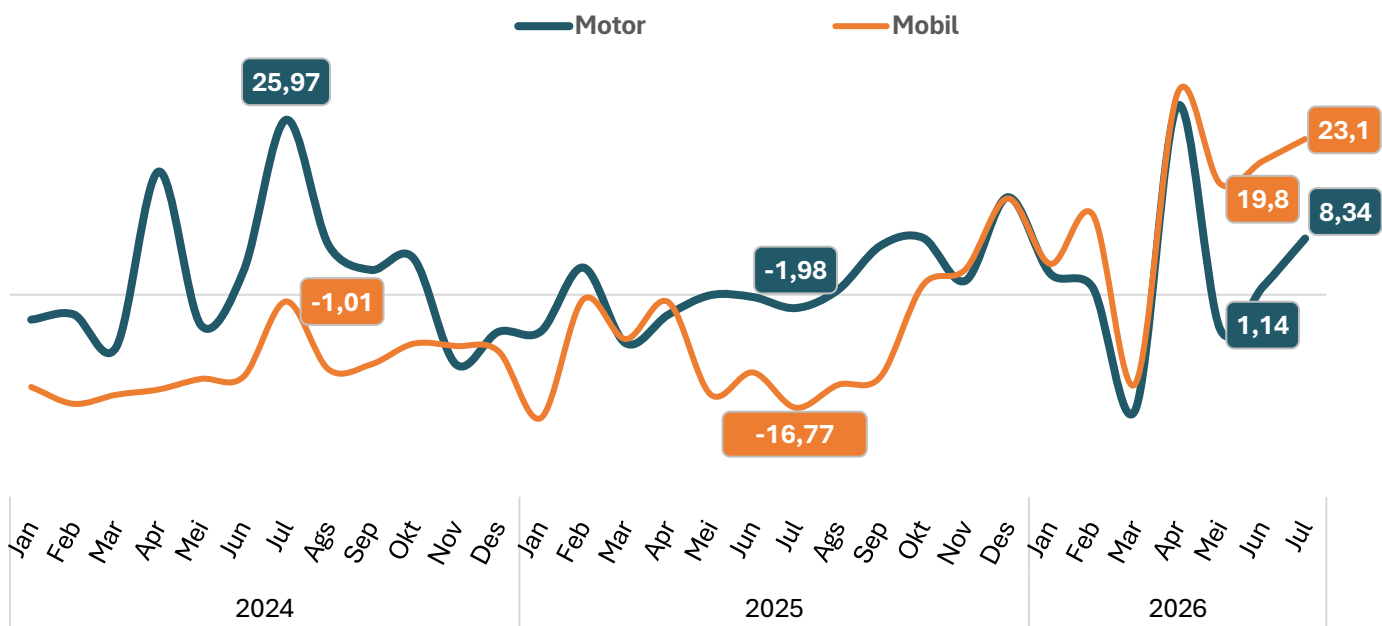
Aktivitas manufaktur pada awal triwulan tiga kembali memasuki jalur ekspansi. Setelah bulan sebelumnya mengalami kontraksi, pada Juli ini PMI Manufaktur meningkat menjadi 50,2. Kinerja manufaktur bulan Juli ini juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada periode yang sama. Ekspansi ini ditopang oleh kenaikan produksi seiring dengan permintaan yang mulai pulih. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan basis pajak daerah, peningkatan PMI Manufaktur dapat mendorong permintaan atas barang atau jasa yang menjadi basis pemungutan pajak daerah sebagai efek *multiplier*-nya.

Sejalan dengan aktivitas manufaktur, penguatan juga terjadi pada daya beli masyarakat periode Juli 2026. Hal ini diindikasikan dari *Retail Sales Index* (RSI) bulan Juli yang tumbuh 1,1% yoy, kendati terdapat perlambatan jika dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun kenaikan RSI terjadi pada beberapa kelompok barang yaitu suku cadang dan aksesoris; makanan, minuman dan tembakau; barang lainnya serta barang sandang.





Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor (%yoy)



Sumber: Gaikindo dan AISI

Sektor otomotif tetap melanjutkan kinerja positif pada periode Juli ini dengan adanya akselerasi penjualan kendaraan bermotor. Kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun penjualan kendaraan roda empat mencapai 77.460 unit, meningkat 23,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya dan tumbuh 4,0% dari bulan sebelumnya. Sementara itu, penjualan kendaraan roda dua pada Juli ini tumbuh sebesar 8,34% secara yoy dan melonjak 23,47% dibandingkan bulan sebelumnya, dengan 636.030 unit terjual. Bahkan, penjualan kendaraan roda dua bulan Juli ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir secara bulanan. Kinerja ini tentu saja berdampak pada peningkatan basis PKB dan selaras dengan peningkatan penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB.

VEHICLE TAX COMPLIANCE



Kepatuhan Pembayaran Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor

Kategori	s.d. Juli 2025 (unit)	s.d. Juli 2026 (unit)	Growth
Lunas	35,373,851	33,726,321	-4.66%
Kendaraan Dengan Tunggakan	4,719,355	2,374,365	-49.69%
Kendaraan Tahun berjalan	26,655,037	27,119,112	1.74%
Kendaraan Baru	3,999,459	4,232,844	5.84%
Belum Lunas	29,854,637	32,304,454	8.21%
Kendaraan Aktif	65,228,488	66,030,775	1.23%
Tingkat Kepatuhan	54.23%	51.08%	-3.15%

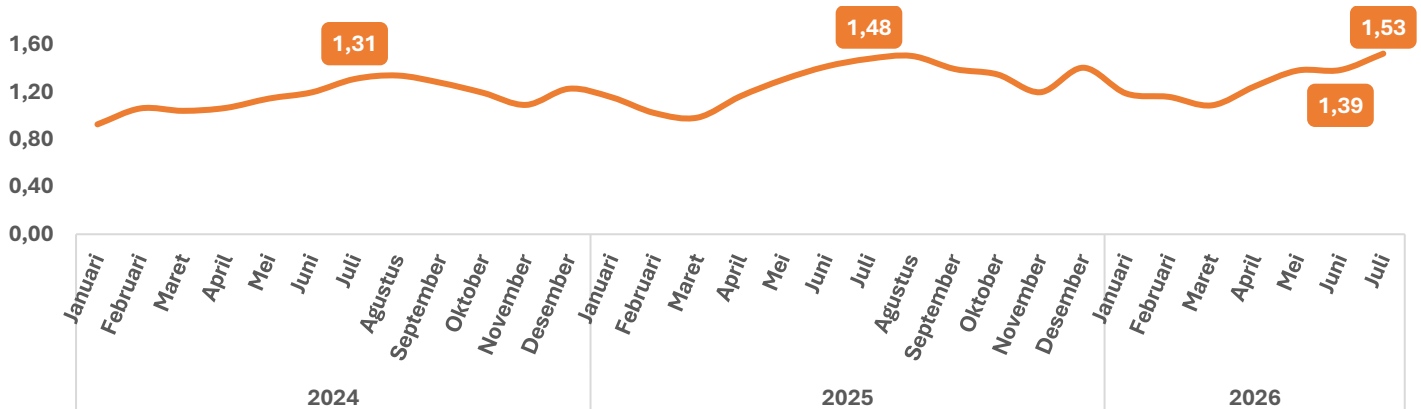
Sumber: Jasa Raharja

Kinerja kepatuhan pembayaran PKB hingga Juli terpantau masih menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendaraan bermotor yang sebelumnya memiliki tunggakan dan melakukan pelunasan jumlahnya semakin menurun signifikan. Artinya kendaraan yang sebelumnya masuk sebagai kategori kepatuhan yang dipaksa bergeser ke dalam area *noncompliance*. Meskipun *voluntary compliance* (jumlah kendaraan baru dan kendaraan tahun berjalan) meningkat, kondisi tersebut belum bisa mendorong tingkat kepatuhan secara total karena efek kontraksi yang lebih besar dari kendaraan dengan tunggakan. Adanya kebijakan insentif pada tahun lalu berupa pembebasan tunggakan pokok PKB di beberapa wilayah disinyalir menjadi faktor yang menyebabkan pendaftaran kembali kendaraan pada tahun lalu lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

TOURISM & HOSPITALITY TREND

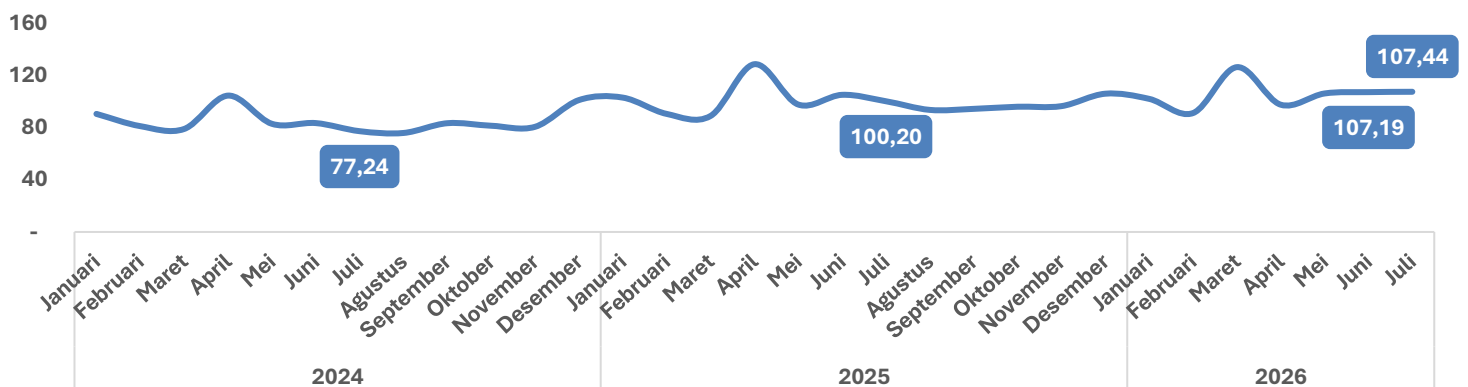


Kunjungan Wisatawan Mancanegara
(Juta Kunjungan)



Sumber: BPS

Kunjungan Wisatawan Nusantara
(Juta Kunjungan)



Sumber: BPS

Sementara itu, kinerja sektor pariwisata pada Juli ini melanjutkan tren peningkatan secara konsisten sejak akhir triwulan satu. Hal tersebut terlihat dari kenaikan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli ini tumbuh 2,95% secara yoy atau meningkat 9,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli ini juga yang tertinggi sepanjang 2026. Sejalan dengan capaian tersebut, perjalanan wisatawan nusantara juga terpantau mengalami kenaikan sebesar 7,23% secara yoy atau 0,23% secara *mtm*.



Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)

Klasifikasi Hotel	Juli-25	Juni-26	Juli-26
Bintang 1	33,92	35,96	35,61
Bintang 2	47,13	50,40	48,99
Bintang 3	50,76	53,15	52,25
Bintang 4	56,38	57,23	57,98
Bintang 5	59,95	58,50	62,34
TPK Bintang	52,79	54,28	54,54
TPK Nonbintang dan Akomodasi Lainnya	26,60	27,59	27,25
TPK (Total)	40,13	41,20	41,13

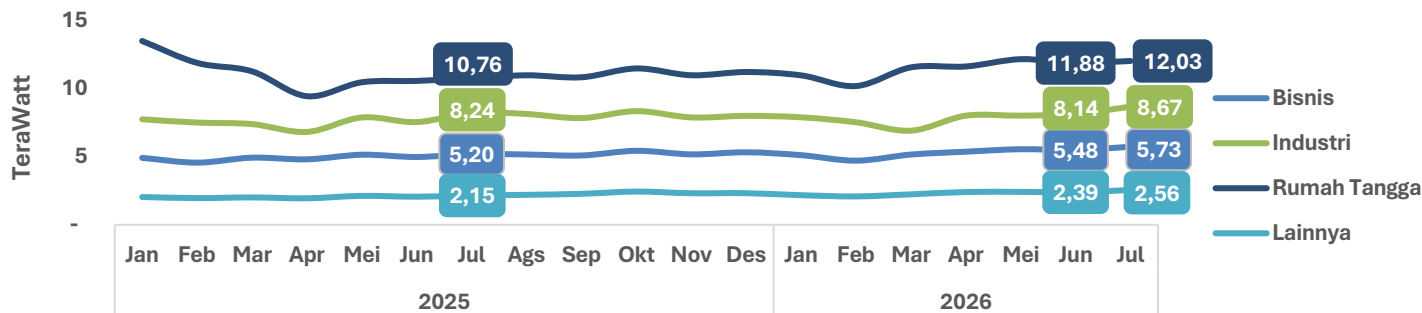
Sumber: BPS

Peningkatan kunjungan wisatawan sejalan dengan kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada berbagai kategori hotel. Secara yoy, semua kategori hotel baik bintang maupun nonbintang mengalami kenaikan TPK. Namun demikian, terdapat beberapa kategori hotel yaitu bintang 1 hingga bintang 3 yang sedikit mengalami penurunan TPK jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, peningkatan TPK tertinggi dialami oleh hotel bintang 5 dengan kenaikan yoy sebesar 2,39%. Kenaikan TPK pada bulan Juli ini juga selaras dengan meningkatnya penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan.

ENERGY CONSUMPTION

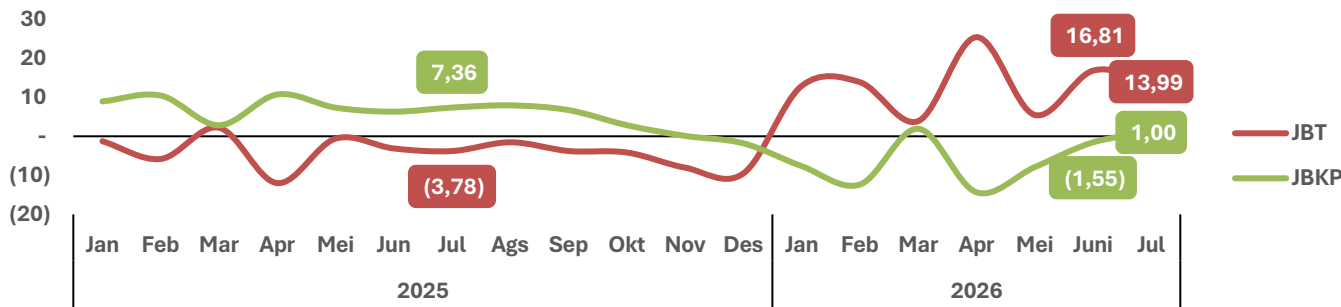


Penjualan Listrik s.d. Juli 2026



Sumber: PLN

Pertumbuhan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor s.d. Juli 2026 (%)



Sumber: BPH Migas

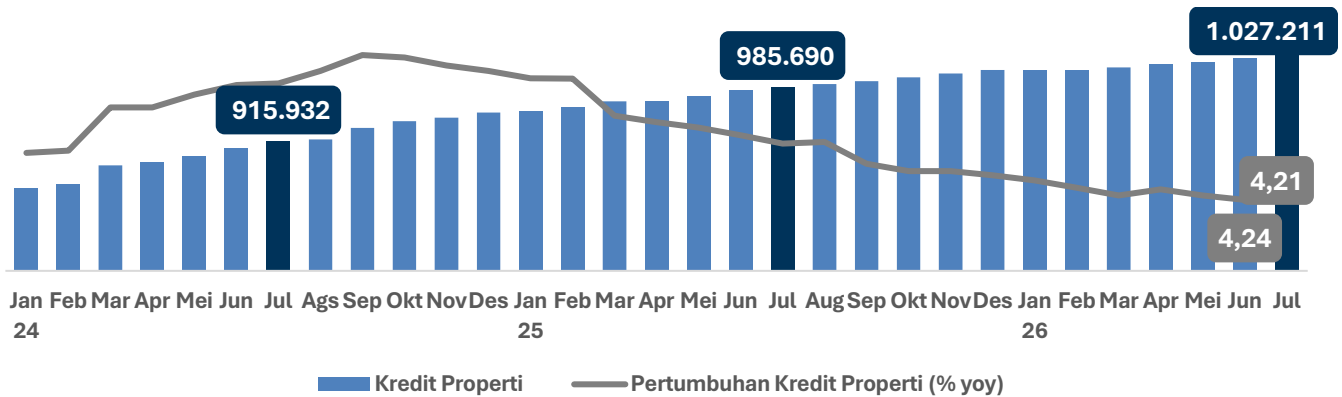
Penjualan listrik yang merupakan salah satu basis utama pajak daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada Juli ini, penjualan listrik mencapai 29 Terawatt, tumbuh 10,09% secara yoy dan 3,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun kenaikan tersebut terjadi pada seluruh kategori pelanggan. Sektor lainnya yang merupakan gabungan dari sektor pemerintahan, sosial, layanan khusus dan lainnya mengalami kenaikan penjualan tertinggi. Secara yoy, pertumbuhannya mencapai 19,38%, sedangkan jika dibandingkan bulan sebelumnya meningkat sebesar 7,41%. Sementara itu, pada kategori rumah tangga, bisnis dan industri, berturut-turut kenaikannya secara yoy adalah sebesar 11,81%, 10,32% dan 5,27%. Kenaikan penjualan listrik khususnya pada ketiga kategori tersebut selaras dengan kenaikan realisasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Sejalan dengan penjualan listrik, penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) untuk JBT dan JBKP pada Juli juga menunjukkan kinerja positif. Penjualan JBT pada Juli 2026 mencapai 1,80 juta kiloliter, tumbuh 13,99% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya dan merupakan penjualan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Penjualan JBKP yang sempat mengalami kontraksi dalam beberapa bulan terakhir, kembali mengalami kenaikan pada Juli ini. Penjualannya mencapai 2,59 juta kiloliter, tertinggi sejak 15 bulan terakhir, atau tumbuh 1% secara yoy. Pertumbuhan penjualan BBKB tersebut selaras dengan kenaikan penerimaan PBBKB pada Juli ini.

¹ Kebijakan jenis-jenis BBM meliputi Jenis BBM Tertentu (JBT) terdiri dari minyak tanah dan solar yang diberikan subsidi dan kompensasi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni bensin RON 90 Peralite yang diberikan kompensasi, dan Jenis BBM Umum (JBU) untuk semua jenis BBM yang tidak diberikan subsidi dan kompensasi (harga *business to business*).



Realisasi dan Pertumbuhan Kredit Properti (miliar rupiah)



Sumber: SSKI, Bank Indonesia

Sektor properti tetap menunjukkan sinyal positif pada Juli 2026 meskipun sedikit terdapat perlambatan. Capaian pertumbuhan kredit properti sebesar 4,21% yoy didorong oleh kredit kepemilikan rumah tapak, terutama untuk tipe 22 m² hingga 70 m² yang tumbuh sebesar 5,58% yoy dan rumah tapak tipe diatas 70 m² yang tumbuh sebesar 4,35%. Kenaikan tersebut sekaligus meredam kontraksi kredit properti yang terjadi pada hunian rumah tapak tipe s.d. 21 m² dan pemilikan rumah susun 70 m² ke bawah. Mengingat sebesar 70,05% kepemilikan rumah diperoleh melalui kredit perbankan, disertai juga dengan kenaikan indeks harga properti residensial sebesar 0,69% yoy, tumbuhnya kredit ini semestinya menjadi sinyal meningkatnya basis penerimaan BPHTB. Namun demikian, respon peningkatan penerimaan BPHTB belum sejalan dengan peningkatan basis pajaknya. Hal ini mengindikasikan adanya *lag* waktu antara administrasi pengalihan hak kepemilikan dengan pembayaran BPHTB, sehingga diperlukan penguatan melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan.

Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan

Optimalisasi penerimaan pajak berbasis properti seperti PBB-P2 dan BPHTB perlu dimulai dengan upaya berbasis pada data spasial. Guna mewujudkan upaya tersebut perlu kolaborasi dengan berbagai pihak mengingat urusan properti atau pertanahan tidak hanya menyangkut kewenangan pemerintah daerah tetapi juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hal tersebut yang menjadi kesadaran dan komitmen bersama antara Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk saling berkolaborasi. Secara teknis, kolaborasi tersebut diimplementasikan melalui integrasi data pertanahan. Nomor Induk Bidang (NIB) tanah yang dimiliki Kementerian ATR/BPN dipadankan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dimiliki pemerintah daerah. Lebih lanjutnya, dalam mendukung kolaborasi ini, Bapenda Kota Tangerang Selatan membangun aplikasi bernama SIGAP yang mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan.

Tahapan integrasi dilakukan mulai dari penyusunan nota kesepakatan antara Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, koordinasi teknis antarpemangku kepentingan khususnya Bapenda dan Kementerian ATR/BPN, inventarisasi data NIB dan NOP, serta sinkronisasi sket bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) dan NIB. Bapenda Kota Tangerang Selatan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, dan percepatan pemutakhiran data PBB-P2 melalui pelaksanaan integrasi data spasial pertanahan dengan data perpajakan, yang selanjutnya dapat meningkatkan potensi penerimaan daerah khususnya PBB-P2 dan BPHTB.

PENANGGUNG JAWAB

Lydia Kurniawati Christyana

TIM PENULIS

1. Guruh Panca Nugraha
2. Catur Panggih Pamungkas
3. Ummi Zulianti
4. Satriyo Ari Raharjo
5. Puput Nurhayati
6. Trianto Budi Utama
7. Muhammad Fawwaz Ananda

MEDIA INFORMASI, PENGADUAN, DAN MASUKAN



Diterbitkan Tahun 2026
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta